

Call for Proposal

Melaksanakan Kajian Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat didalam Kawasan Konservasi dan Wilayah Kelola Masyarakat Hukum Adat

LATAR BELAKANG

Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan Daerah Otonomi Baru pemekaran dari Provinsi Papua Barat memiliki kawasan konservasi tersebar di masing-masing kabupaten pesisirnya. Didalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2022 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2021-2041 mengalokasikan sekitar 3,1 juta Ha sebagai kawasan konservasi. Misool bagian utara yang merupakan kawasan konservasi yang baru ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan akhir tahun 2023, serta Maksegara yang merupakan calon kawasan konservasi saat ini sedang dalam proses menuju Penetapan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain itu, dalam kebijakan tersebut diatas, juga telah diakomodir sekitar 16.000 Ha wilayah MHA yang salah satunya MHA Moi di Malaumkarta Raya di Kabupaten Sorong serta MHA Byak Karon di Werur Raya Kabupaten Tambrauw.

Untuk mengukur sejauh mana manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan konservasi dan wilayah kelola MHA tersebut terpenuhi, perlu dilakukan serial survei untuk mengetahui tren kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kondisi kerentanan komunitas masyarakat pesisir. Namun demikian, diperlukan data dasar sebagai tolak ukur efektivitas pengelolaan dari aspek social, ekonomi, budaya serta kerentanan penghidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

Tujuan utama yang diharapkan dari penilaian dasar ini, untuk membangun kumpulan data dan informasi yang komprehensif dalam rangka mengetahui kondisi sosial, ekonomi dan budaya terhadap adanya pengembangan kawasan konservasi dan pengelolaan wilayah MHA serta menialai tingkat kerentanan kapasitas masyarakat pesisir dari aspek mata pencaharian di dalam Kawasan konservasi dan wilayah kelola MHA.

Pada akhir implementasi kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan dokumen kondisi data dasar social, ekonomi dan budaya masyarakat pesisir diwilayah Kawasan konservasi dan wilayah kelola MHA serta dokumen kajian tingkat kerentanan kapasitas masyarakat pesisir dari aspek penghidupan dan mata pencaharian di dalam kawasan konservasi dan wilayah kelola MHA.

KETENTUAN DAN KRITERIA PROPOSAL

1. Pelaksanaan kajian baseline sebaiknya berbentuk tim yang dipimpin oleh peneliti dari lembaga penelitian/universitas, dapat beranggotakan akademisi dari lembaga penelitian/universitas, aparatur dari institusi perumus kebijakan seperti Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (P2KP) setempat, Balitbangda (BRIDA), Koordinator dan anggota tim adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam tim tersebut, terdapat peneliti yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang ilmu sosial dan ilmu kelautan/biologi termasuk biologi, antropologi, ekonomi dan budaya masyarakat, pengelolaan kawasan konservasi/ lingkungan hidup,
3. Dalam proposal menguraikan metodologi yang digunakan terutama metodologi survei sosial ekonomi yang diakui oleh lembaga berwenang serta dapat dilakukan secara terus menerus secara series dan adptif dengan keadaan di Kawasan konservasi dan wilayah Kelola MHA. Selain itu, alur dan jadwal kegiatan teknis disajikan dalam bentuk diagram atau table yang mudah dipahami.
4. Lokasi spesifik penelitian dikhususkan untuk Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya.
5. Proposal dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia. Proposal juga harus melampirkan dokumen-dokumen yaitu: (i) *Curriculum Vitae* (CV) maksimal 1 halaman untuk masing-masing anggota tim; (ii) Surat dukungan kegiatan riset dari lembaga terkait.

PEMBIAYAAN

Proposal yang terpilih akan didanai maksimum hingga Rp. 576.000.000 (Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah). Jumlah tersebut sudah termasuk untuk membiayai kegiatan kerja lapangan, analisis dan pengumpulan data, biaya perjalanan terkait dengan analisis, transportasi dan akomodasi, sarana prasarana untuk mendukung study, pelatihan, lokakarya atau kegiatan serupa, serta honorarium/fee untuk para peneliti (d disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku).

SELEKSI

Proses seleksi memprioritaskan proposal yang dapat menggambarkan uraian metodologi kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta kerentanan masyarakat terhadap penghidupannya, merekomendasikan strategi kebijakan termasuk isu-isu terkini dari aspek sosial dan ekonomi, tantangan serta peluang dalam mengembangkan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam Kawasan konservasi dan wilayah Kelola MHA. Bobot seleksi penilaian adalah sebagai berikut:

Kriteria Penilaian	Bobot Penilaian
Relevansi proposal sebagai basis data terkini dan sebagai informasi rujukan terhadap dampak pengembangan Kawasan konservasi dan pengelolaan wilayah MHA terutama dalam aspek sosial, ekonomi, budaya serta kesejahteraan masyarakat. Memerlihatkan pemahaman teknis terhadap metodologi yang digunakan, dan penguasaan analisis yang kuat, serta keterkaitan aspek kesejahteraan dan penghidupan masyarakat pesisir.	50%
Komposisi tim merupakan lembaga penelitian/universitas dan lembaga lainnya, komposisi dibidang keahlian (sosial, ekonomi, budaya), dan peran dari masing-masing anggota tim.	25%
Menghasilkan sistem data baseline yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur pengembangan kebijakan pengelolaan Kawasan konservasi dan wilayah Kelola MHA.	25%

TATA WAKTU DAN TANGGAL PENTING

<i>Call for proposals</i>	5 Januari 2024
<i>Deadline</i> pengiriman proposal	16 Januari 2024
Seleksi proposal (dua tahap proses seleksi)	17-19 Januari 2024
Pengumuman proposal terpilih	20-22 Januari 2024
Lama waktu pelaksanaan kajian	Februari 2024 – April 2024

Proposal diajukan selambat-lambatnya tanggal 16 Januari 2024, pukul 22.00 WIT dalam bentuk *soft file* pada email: irwanto@ykan.or.id

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Irwanto, Project Coordinator DI Extra FFI Ridge to Reef – Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Hp 08114852164